

INFLASI

Inflation di Februari

Inflasi meningkat pesat pada 2013 dengan tingkat inflasi umum (*headline inflation*) pada Februari 2013 sebesar 0,75% dan inflasi *year-on-year* sebesar 5,3%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan pada Februari 2012 (3,6%) namun tidak lebih tinggi dari standar selama ini: tingkat inflasi dari 2007 ke 2011 berkisar antara 2,8% hingga 11,1% per tahun. Kontributor terbesar inflasi Februari adalah harga bahan makanan yang menyumbang lebih dari setengah inflasi bulanan (0,495% dari 0,75%). Inflasi harga bahan makanan tidak berasal dari kenaikan harga makanan pokok, seperti nasi, namun dari kenaikan tajam pada harga bahan makanan lain, seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai. Harga domestik yang tinggi pada komoditas itu tidak disebabkan oleh tingginya harga pasar dunia. Sementara ada kekhawatiran akan manipulasi pasar, sebagian besar pengamat menyakini penyebab langsung dari kenaikan harga ini adalah pembatasan impor oleh pemerintah.

Meningkatnya harga bahan makanan memberi dampak besar pada penduduk miskin; tingkat inflasi untuk penduduk miskin perkotaan (6,3% *year-on-year*) dan untuk penduduk miskin pedesaan (5,8% ATAU 6%) lebih tinggi dibandingkan inflasi umum (5,3%). Hal ini menggambarkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan apabila kebijakan pemerintah tidak dirancang dan diimplementasikan dengan matang.

Di daerah pedesaan, inflasi Februari 2013 sebesar 0,66% dengan inflasi tertinggi pada kelompok bahan makanan (1,33%). Serupa dengan penduduk miskin perkotaan, inflasi untuk penduduk miskin pedesaan juga lebih tinggi dibandingkan inflasi pedesaan (0,72%). Inflasi *year-on-year* untuk pedesaan pada Februari 2013 sebesar 5,77% sementara inflasi *year-on-year* untuk penduduk miskin pedesaan sedikit lebih tinggi, yaitu 5,95%.

Harga pangan dunia

Harga pangan dunia pada Februari 2013 tidak berubah dari Januari 2013 namun 2,5% di bawah rata-rata untuk 2012. Harga sereal, minyak/lemak, dan daging pada Februari 2013 tidak berubah dibandingkan Januari 2013, dan dibandingkan tahun lalu. Tekanan pada harga bahan makanan Indonesia yang berasal dari tingginya harga pasar dunia tidak menjadi faktor dalam inflasi seperti sebelumnya, mengingat situasi pangan dunia telah membaik.

PEMBANGUNAN

Perekonomian dunia perlahan membaik namun prakiraan pertumbuhan tetap rendah

Prakiraan World Bank pada Januari 2013 untuk pertumbuhan PDB dunia lebih pesimistik dibandingkan prakiraan sebelumnya: laporan memproyeksikan ekspansi ekonomi dunia pada tahun 2013 hanya sebesar 2,3%, turun dibandingkan prakiraan enam bulan lalu sebesar 3,0%. Pertumbuhan pada Produk Domestik Bruto (PDB) global pada 2012 juga direvisi hingga turun ke 2,3%.

Pertumbuhan ekonomi dunia pada kuartal terakhir 2012 tetap lemah dengan pertumbuhan di Amerika Serikat dan Jepang stabil. Pulihnya pasar perumahan di Amerika Serikat membantu memperbaiki perekonomian namun manis terdapat ketidakpastian akibat konsolidasi fiskal yang sedang berlangsung. Di Eropa, kondisi perekonomian tetap penuh tantangan dengan adanya indikasi permasalahan di Cyprus baru-baru ini. Pertumbuhan ekonomi Cina meningkat pesat ke 2%, *quarter-on-quarter*, karena pertumbuhan kredit yang pesat dan perubahan kebijakan Jepang dari penekanan pada penghematan ke penekanan pada pertumbuhan. Indonesia tidak bisa bergantung pada pertumbuhan dunia yang lebih pesat dan harga tinggi pada komoditas ekspornya untuk memberi dorongan pada pertumbuhannya sendiri.

Indonesia terus berkembang stabil

World Bank baru merilis laporan *Indonesia Economic Quarterly*. Laporan ini menyimpulkan bahwa perekonomian Indonesia terus berkembang secara stabil pada kuartal terakhir 2012, yang menyebabkan PDB tahun 2012 tumbuh sebesar 6,2 persen. Nilai ini hanya merupakan penurunan kecil dari pertumbuhan 6,5 persen yang tercatat pada 2011 – kinerja yang sangat baik mengingat lingkungan global yang lemah dan kondisi pasar keuangan yang tidak stabil yang terjadi di hampir sepanjang tahun. Proyeksi pertumbuhan 2013 sebesar 6,2 persen, sedikit di bawah proyeksi World Bank pada Desember 2012. Kontributor utama terhadap pertumbuhan masih berupa konsumsi swasta yang didorong oleh pengeluaran pra-pemilu yang dimulai pada pertengahan tahun. Investasi tetap tumbuh dengan laju lebih perlahan dibandingkan 2012, dengan adanya ketidakpastian akan kebijakan pemerintah dan penurunan harga komoditas di 2012 mempengaruhi keputusan investasi.

Perumbuhan di atas 6% seharusnya dapat mengarah ke penurunan perlahan pada tingkat kemiskinan. Namun tingkat pertumbuhan ini tidak akan menimbulkan perbaikan pada kesejahteraan penduduk miskin yang ditargetkan oleh pemerintah.

Laporan ini dibuat dengan bantuan dari Penduduk Amerika melalui United States Agency for International Development (USAID). Isi dari laporan ini adalah tanggung jawab penuh dari para penulis dan tidak mewakili pendapat USAID maupun pemerintah Amerika Serikat.

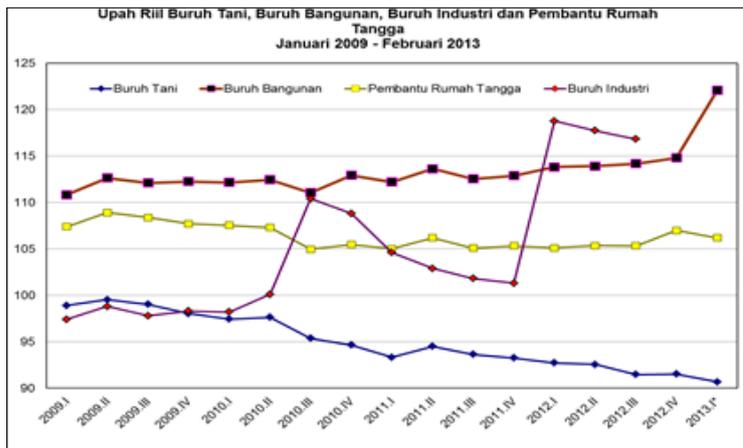
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia

Jl. Kebon Sirih No. 35, Jakarta, 10110, Indonesia

Office: +62 21 3912812 Fax: +62 21 3912513 <http://www.tnp2k.go.id>

This Poverty and the Economy is published by USAID - SEADI (Support for Economic Analysis Development in Indonesia) for TNP2K





Neraca perdagangan non migas membaik pada Januari 2013

Ekspor non migas pada Januari 2013 sedikit meningkat dari bulan sebelumnya, sementara impor non migas sedikit turun, sebagian karena rendahnya impor barang modal. Barang konsumen juga turun, sebagian akibat kebijakan pemerintah yang membatasi impor. Hasilnya, neraca perdagangan non migas positif pada Januari 2013 sebesar kurang lebih \$1,2 milyar. Namun, neraca perdagangan migas mencatat defisit terbesarnya senilai \$1,4 milyar sebagai akibat berlanjutnya kebijakan subsidi bahan bakar minyak. Dengan demikian, neraca perdagangan tetap negatif, seperti sepanjang tahun 2012. Karena Indonesia memiliki defisit besar pada neraca pendapatan dan jasa, pada akhir 2012 terdapat defisit \$8 milyar pada neraca transaksi berjalan. Data untuk Januari 2013 terus defisit, didanai oleh penarikan cadangan, dan terutama oleh arus masuk modal jangka pendek. Hingga pendapatan ekspor Indonesia dapat meningkat, tingkat pertumbuhan nasional akan terhambat oleh kemampuan negara yang terbatas dalam menarik modal asing untuk membiayai defisit neraca transaksi berjalan.

Dampak terhadap Penduduk Miskin

Upah sektor formal dan informal memberi gambaran berbeda

Peningkatan substansial upah minimum untuk 2013 dan aktivitas konstruksi menguntungkan buruh bangunan yang upah riilnya meningkat 7% dari awal 2012 ke Januari/Februari 2013. Seiring itu, upah riil buruh tani turun sebesar 2%. Tren sama bertahan untuk periode lebih lama - dari kuartal pertama 2009 ke dua bulan pertama tahun 2013 upah riil buruh konstruksi meningkat 10%, sementara upah riil untuk buruh tani turun sebesar 8% dan untuk pembantu rumah tangga stagnan (turun sebesar -1%).

Walau peningkatan besar pada upah minimum bagai kemenangan bagi penduduk miskin, ini diduga hanya akan dinikmati sebagian kecil tenaga kerja. Dampak utama peningkatan-peningkatan ini dapat memperlambat pertumbuhan lapangan kerja sektor formal dan karenanya membatasi dampak positif peningkatan upah minimum ke sebagian kecil pekerja, sementara sebagian besar penduduk miskin dan pekerja tidak terampil di sektor informal justru mengalami penurunan daya beli - upah nominal mereka meningkat lebih sedikit dibandingkan tingkat inflasi.

LAPORAN KHUSUS

Kemiskinan dan Sektor Jasa

Sektor jasa memiliki peran penting untuk penanggulangan kemiskinan. Peningkatan kualitas sektor jasa seperti mutu pendidikan dan jasa kesehatan lebih baik akan berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan dari sisi ketersediaan. Selain itu, sektor ini menyediakan lapangan kerja. Saat ini, setengah populasi Indonesia tinggal di kota dan sebagian besar penduduk miskin perkotaan bekerja di sektor jasa, terutama perdagangan, transportasi, sosial, dan swasta. Seperti dijabarkan Manning dan Aswicahyono (2012) dalam laporan ILO, lebih dari setengah pekerja Indonesia berada di sektor jasa, bahkan bukan konstruksi, dan dua pertiga pertumbuhan lapangan kerja tahun 2000-an adalah sektor jasa.

Sektor jasa menggunakan pekerja perempuan maupun laki-laki; sektor perdagangan adalah satu-satunya sektor dimana perempuan meraih kesetaraan proporsional. Jasa sosial dan kemasyarakatan masuk pada urutan dua (jasa finansial menjadi domain laki-laki).

Distribusi pekerjaan berubah sesuai pendidikan tersier. Hampir setengah dari pekerja berpendidikan tersier berada di sektor pendidikan (guru, dan lain-lain). Dengan jasa pemerintahan, hampir dua pertiga adalah lulusan berpendidikan tersier. Walaupun retail-grosir mempekerjakan 40% seluruh sektor, hanya 7% lulusan yang terserap. Pekerja berpendidikan rendah terkonsentrasi di sektor tertentu seperti konstruksi dan transportasi jalan raya, dan juga sangat terkonsentrasi di sektor informal.

Migrasi internasional adalah salah satu hal penting dalam pembentukan pekerjaan di sektor jasa. Di Indonesia ada sekitar 4,3 juta pekerja migran, atau 4% angkatan kerja. Malaysia dan Saudi Arabia mempekerjakan 75% dari jumlah total, dimana jasa rumah tangga menyerap sekitar 60-70% di setiap lokasi kecuali Malaysia. Sebagian besar buruh migran terhitung pekerja tidak terampil (sekitar 90%). Pendapatan devisa dari remitan sekitar \$6-7 milyar - jumlah yang besar meskipun hanya sekitar 3-5% dari total pendapatan devisa. Rata-rata remitan lebih besar, berasal dari negara-negara Asia Timur. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remitan digunakan untuk biaya pendidikan dan kesehatan keluarga-keluarga miskin ini.

Dengan sebagian besar pekerja tidak terampil, Indonesia perlu mengembangkan sistem lebih komprehensif untuk melindungi pekerja migran (seperti Filipina), terutama bagi pekerja sektor informal. Salah satu solusi usulan studi ini adalah agar pemerintah mengembangkan program pelatihan sehingga pekerja migran mampu bekerja di sektor formal. Hal ini akan membantu menjaga tingkat migrasi keluar yang tinggi dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan dengan lebih efektif.

Manning, Chris and Haryo Aswicahyono, *Trade and Employment in Services: The Case of Indonesia*, International Labour Office - Jakarta: ILO, 2012